



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2005  
TANGGAL 13 JUNI 2005

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
PERNYATAAN NO. 05**

**AKUNTANSI PERSEDIAAN**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> -----	<b>1-4</b>
Tujuan-----	1
Ruang Lingkup-----	2-4
<b>DEFINISI</b> -----	<b>5</b>
<b>UMUM</b> -----	<b>6-13</b>
<b>PENGAKUAN</b> -----	<b>14-17</b>
<b>PENGUKURAN</b> -----	<b>18-24</b>
<b>PENGUNGKAPAN</b> -----	<b>25</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> -----	<b>26</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

# 1 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2 PERNYATAAN NO. 05

## 3 AKUNTANSI PERSEDIAAN

4 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*  
5 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*  
6 *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*  
7 *Akuntansi Pemerintahan.*

### 8 **PENDAHULUAN**

#### 9 **Tujuan**

10 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan  
11 akuntansi untuk persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan  
12 dalam laporan keuangan.

#### 13 **Ruang Lingkup**

14 2. *Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian seluruh*  
15 *persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan*  
16 *disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja,*  
17 *transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos*  
18 *aset, kewajiban, dan ekuitas. Standar ini diterapkan untuk seluruh entitas*  
19 *pemerintah pusat dan daerah tidak termasuk perusahaan negara/daerah.*

20 3. Perusahaan negara/daerah dipersyaratkan tunduk pada Standar  
21 Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

22 4. Standar ini mengatur perlakuan akuntansi persediaan pemerintah  
23 pusat dan daerah yang meliputi :

- 24 (a) Definisi,
- 25 (b) Pengakuan
- 26 (c) Pengukuran, dan
- 27 (d) Pengungkapan.

### 28 **DEFINISI**

29 5. *Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam*  
30 *Pernyataan Standar dengan pengertian:*

31 ***Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh*  
32 *pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat*  
33 *ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik*  
34 *oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan*  
35 *uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 *penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang*  
2 *dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.*

3 *Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak*  
4 *yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.*

5 *Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan*  
6 *yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah,*  
7 *dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan*  
8 *dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.*

9 *Perusahaan negara/daerah adalah badan usaha yang seluruh atau*  
10 *sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah.*

## 11 **UMUM**

12 **6. *Persediaan merupakan aset yang berwujud:***

13 **a. *Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka***  
14 ***kegiatan operasional pemerintah;***

15 **b. *Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses***  
16 ***produksi;***

17 **c. *Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau***  
18 ***diserahkan kepada masyarakat.***

19 **d. *Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada***  
20 ***masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan;***

21 **7. *Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan***  
22 ***disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor,***  
23 ***barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas***  
24 ***pakai seperti komponen bekas.***

25 **8. *Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga***  
26 ***meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku***  
27 ***pembuatan alat-alat pertanian.***

28 **9. *Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai***  
29 ***persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.***

30 **10. *Persediaan dapat meliputi:***

31 **a. *Barang konsumsi;***

32 **b. *Amunisi;***

33 **c. *Bahan untuk pemeliharaan;***

34 **d. *Suku cadang;***

35 **e. *Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;***

36 **f. *Pita cukai dan leges;***

37 **g. *Bahan baku ;***

38 **h. *Barang dalam proses/setengah jadi;***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.  
2 j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

3 11. Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan  
4 strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-  
5 jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui  
6 sebagai persediaan.

7 12. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada  
8 masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

9 13. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan  
10 dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## 11 **PENGAKUAN**

12 **14. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa**  
13 **depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat**  
14 **diukur dengan andal.**

15 **15. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya**  
16 **dan/ atau penguasaannya berpindah.**

17 16. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil  
18 inventarisasi fisik.

19 17. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek  
20 swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam  
21 pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

## 22 **PENGUKURAN**

23 **18. Persediaan disajikan sebesar:**

24 **(a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;**

25 **(b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;**

26 **(c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti**  
27 **donasi/rampasan;**

28 19. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya  
29 pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung  
30 dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan  
31 lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

32 20. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan  
33 persediaan yang terakhir diperoleh.

34 21. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan  
35 untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

36 22. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait  
37 dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan  
38 secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat  
39 penyusunan rencana kerja dan anggaran.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1           23.   Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai  
2 dengan menggunakan nilai wajar.

3           24.   Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau  
4 penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan  
5 melakukan transaksi wajar.

## 6           **PENGUNGKAPAN**

7           25.   *Laporan keuangan mengungkapkan:*

8           (a)   *Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran*  
9           *persediaan;*

10          (b)   *Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau*  
11          *perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat,*  
12          *barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi,*  
13          *barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada*  
14          *masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang*  
15          *dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat ;*

16          (c)   *Kondisi persediaan;*

## 17          **TANGGAL EFEKTIF**

18          26.   *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku efektif*  
19          *untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran*  
20          *mulai tahun Anggaran 2004.*

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

**Sugiri, S.H.**